



**EFEKTIVITAS AKTIVISME DIGITAL DALAM
MENDORONG DEMOKRATISASI: STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSYARATAN
PENCALONAN WAKIL PRESIDEN DAN PERSYARATAN
PENCALONAN KEPALA DAERAH**

TESIS

**Bambang Eryanto Hermawan
2210426001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER
2026**



**EFEKTIVITAS AKTIVISME DIGITAL DALAM
MENDORONG DEMOKRATISASI: STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSYARATAN
PENCALONAN WAKIL PRESIDEN DAN PERSYARATAN
PENCALONAN KEPALA DAERAH**

TESIS

**Bambang Eryanto Hermawan
2210426001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bambang Eryanto Hermawan

NIM : 2210426001

Program Studi : Magister Ilmu Politik

Bila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "C5BAEAOX107828422".

Bambang Eryanto Hermawan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Eryanto Hermawan
NIM : 2210426001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S2 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

EFEKTIVITAS AKTIVISME DIGITAL DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSYARATAN PENCALONAN WAKIL PRESIDEN DAN PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2026
Yang menyatakan,



Bambang Eryanto Hermawan

PENGESAHAN TESIS

NAMA : Bambang Eryanto Hermawan

NIM : 2210426001

PROGRAM STUDI : S2 Ilmu Politik

JUDUL : **EFEKTIVITAS AKTIVISME DIGITAL DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI:
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSYARATAN
PENCALONAN WAKIL PRESIDEN DAN PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA
DAERAH**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi S2 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing 1



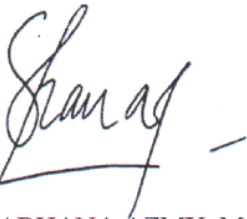
(LUKY DJUNIARDI DJANI, S.T., M.P.P., Ph.D.)

Pembimbing 2



(Dr. RIDWAN, S.Sos., M.Si, CIQnR.)

Penguji 1



(Dr. ANASABHANA AZMY, M.I.P.)

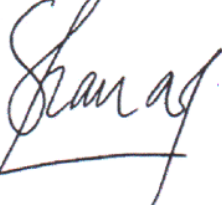
Penguji 2



(Dr. NURDIN, M.Si)

Ketua Program Studi

S2 Ilmu Politik



(Dr. ANASABHANA AZMY, M.I.P.)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 21 Juli 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Persyaratan Pencalonan Wakil Presiden dan Pencalonan Kepala Daerah”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Nya selama proses penyusunan tesis ini.
2. Istri Saya dan Kedua Anak Saya sebagai keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti kepada penulis.
3. Alm. Bapak Saya dan Almh. Ibu Saya sebagai orang tua kandung saya, dan Alm. Bapak Mertua Saya dan Almh. Ibu Mertua Saya, serta seluruh keluarga Istri saya tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti kepada penulis.
4. Ibu **Dr. Ana Sabhana Azmy, M.I.P.**, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Politik dan Dosen Penguji 1 yang telah memberikan spirit, arahan, kritik, masukan, serta bimbingan akademik dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis.
5. Bapak **Luky Djuniardi Djani, S.T., M.P.P., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritik, masukan, serta

bimbingan akademik dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis.

6. Bapak **Dr. Ridwan, S.Sos., M.Si., CIQnR.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan berbagai saran, masukan, dan perhatian sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
7. Bapak **Dr. Nurdin, M.Si.,** selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan berbagai saran, masukan, kritik dan perhatian sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
8. Kakak dan Adik Kandung Saya, serta Kakak dan Adik Ipar Saya sebagai seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti kepada penulis.
9. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik selama masa studi.
10. Seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan.
11. Seluruh informan, narasumber, serta pihak-pihak yang telah membantu proses penelitian, termasuk penyedia data yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik serta seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan, semangat, diskusi akademik, dan berbagai masukan selama proses penyusunan tesis.
13. Rekan-rekan sejawat Team Teaching Program Magister Ilmu Hukum UGM serta seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan, semangat, diskusi akademik, dan berbagai masukan selama proses penyusunan tesis.

14. Rekan-rekan Team Research yang terdiri dari: Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., Rado F Leonardus, S.H., M.H., C.L.A., Putri Masyitoh, SH, MH., Sheva Trisanda Adistia, S.H. yang telah memberikan dukungan, semangat, diskusi akademik, dan berbagai masukan selama proses penyusunan tesis.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penelitian ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, komunikasi politik, demokrasi digital, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai aktivisme digital di Indonesia.

Jakarta, 21 Juli 2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

B. E. Hermawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR HALAMAN	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. RUMUSAN MASALAH	5
III. TUJUAN PENELITIAN	5
IV. MANFAAT PENELITIAN	5
V. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
II.1 . TEORI DAN KONSEPTUAL.....	8
II.1.1. Teori Aktivisme Digital Terintegrasi (<i>Theory Integrated Digital Activism</i>).....	16
II.1.2. Teori Aktivisme Digital dalam Ruang Hybrid (<i>Theory Hybrid Media Ecology</i>)	17
II.1.3. Konseptual.....	19
III.2. KERANGKA PENELITIAN.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
III.1. Metodologi Penelitian.....	27
III.2. Desain Penelitian	28
III.3. Rancangan Pengolahan Data Penelitian	28
III.4. Rancangan Pendekatan Penelitian	29
III.4. 1. Kuantitatif (Data Angka/Statistik) sebagai Survei Online	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Aktivisme Digital pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	33

4.1.1. Struktur Jaringan Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	33
4.1.2. Narasi dan <i>Hashtag</i> dalam Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	37
4.2. Aktivisme Digital pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024	48
4.2.1. Struktur Jaringan Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	48
4.2.2. Narasi dan <i>Hashtag</i> dalam Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	53
4.3. Political Awareness Politik dalam Aktivisme Digital	64
4.3.1. Peningkatan Political Awareness di Ruang Online	64
4.3.2. Political Awareness dalam Perspektif Lukas Schlögl.....	65
4.3.3. Political Awareness dalam Perspektif Merlyna Lim	68
4.3.4. Hubungan Political Awareness dan Transparansi Politik dalam Aktivisme Digital	71
4.4. Transparansi Politik dalam Aktivisme Digital.....	73
4.4.1. Tingkat Pencapaian Transparansi Politik dalam Aktivisme Digital ...	74
4.4.2. Transparansi Politik dalam Perspektif Lukas Schlögl.....	76
4.4.3. Transparansi Politik dalam Perspektif Merlyna Lim	79
4.5. Partisipasi Politik dalam Aktivisme Digital.....	82
4.5.1. Tingkat Pencapaian Partisipasi Politik dalam Aktivisme Digital.....	82
4.5.2. Partisipasi Politik dalam Perspektif Lukas Schlögl.....	84
4.5.3. Partisipasi Politik dalam Perspektif Merlyna Lim	86
4.6. Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi.....	89
4.6.1. Tingkat Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi	89
4.6.2. Efektivitas Aktivisme Digital dalam Perspektif Lukas Schlögl	91
4.6.3. Efektivitas Aktivisme Digital dalam Perspektif Merlyna Lim.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Flowchart Kerangka Berfikir	26
4.1	Visualisasi Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	36
4.2.	Word Cloud Klaster Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	42
4.3	Word Cloud Klaster Pro Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	47
4.4	Visualisasi Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	52
4.5	Word Cloud Klaster Kritik (Kontra) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	58
4.6	Word Cloud Klaster Pro (Pendukung) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	63

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul	Halaman
4.1	Statistik Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	35
4.2	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	39
4.3.	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Pro Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	44
4.4	Statistik Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	51
4.5	Perbandingan Statistik Jaringan Putusan MK Nomor 90 dan Putusan MK Nomor 70	53
4.6	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	55
4.7	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Pendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	60
4.8	Political Awareness Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	67

4.9	Political Awareness Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	69-70
4.10	Hubungan Political Awareness dan Transparansi Politik Berdasarkan Temuan Empiris	72
4.11	Transparansi Politik di Ruang Online	75-76
4.12	Analisis Transparansi Politik Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	77
4.13	Transparansi Politik Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	79
4.14	Tingkat Pencapaian Partisipasi Politik dalam Aktivisme Digital	82
4.15	Partisipasi Politik Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	85
4.16	Partisipasi Politik Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	87
4.17	Tingkat Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi	89
4.18	Efektivitas Aktivisme Digital Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	92
4.19	Efektivitas Aktivisme Digital Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	96

**EFEKTIVITAS AKTIVISME DIGITAL DALAM MENDORONG
DEMOKRATISASI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSYARATAN PENCALONAN WAKIL
PRESIDEN DAN PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH**

Bambang Eryanto Hermawan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aktivisme digital dalam mendorong demokratisasi melalui studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai persyaratan pencalonan Kepala Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data percakapan publik pada platform X (Twitter) yang diperoleh melalui proses *crawling* data. Analisis dilakukan menggunakan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan struktur jaringan komunikasi digital serta System Intelligence Analytics (SIA) untuk mengidentifikasi pola narasi, sentimen, dan hashtag yang berkembang. Analisis empiris diinterpretasikan menggunakan teori aktivisme digital dari Lukas Schlögl dan teori *hybrid media ecology* dari Merlyna Lim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan dinamika aktivisme digital yang berbeda. Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, percakapan digital didominasi oleh kritik terhadap dugaan politik dinasti dan pelanggaran prinsip demokrasi konstitusional, namun mobilisasi yang terbentuk cenderung terkonsentrasi pada ruang digital sehingga efektivitasnya terhadap perubahan politik relatif terbatas. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, aktivisme digital berkembang menjadi gerakan yang lebih terintegrasi melalui keterhubungan antara ruang digital, media arus utama, masyarakat sipil, dan aksi kolektif di ruang publik. Kondisi tersebut meningkatkan *political awareness*, memperkuat transparansi politik, memperluas partisipasi masyarakat, serta menghasilkan tekanan publik yang lebih signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas aktivisme digital dalam mendorong demokratisasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya intensitas percakapan di media sosial, tetapi juga oleh kemampuan gerakan digital membangun keterhubungan dengan aktor sosial, media, dan aksi kolektif di luar ruang digital. Dengan demikian, aktivisme digital berfungsi sebagai instrumen demokrasi partisipatif yang efektif apabila mampu menghubungkan mobilisasi daring dengan perubahan sosial dan politik secara nyata.

Kata kunci: Aktivisme Digital, Demokratisasi, Mahkamah Konstitusi, Social Network Analysis, Political Awareness, Partisipasi Politik..

THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL ACTIVISM IN PROMOTING DEMOCRATIZATION: A CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS CONCERNING THE REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDACIES AND REGIONAL HEAD CANDIDACIES

Bambang Eryanto Hermawan

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of digital activism in promoting democratization through a case study of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the eligibility requirements for Vice Presidential candidates and Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 concerning the eligibility requirements for Regional Head candidates. The research employs a quantitative approach using public conversations collected from the X (formerly Twitter) platform through a data crawling process. The data were analyzed using Social Network Analysis (SNA) to examine the structure of digital communication networks and System Intelligence Analytics (SIA) to identify narrative patterns, sentiments, and dominant hashtags. The empirical findings were interpreted using Lukas Schlögl's Digital Activism Theory and Merlyna Lim's Hybrid Media Ecology Theory.

The findings reveal that the two Constitutional Court decisions generated different patterns of digital activism. The discussion surrounding Decision Number 90/PUU-XXI/2023 was predominantly characterized by criticism of alleged political dynasty practices and concerns over constitutional democracy. However, the resulting mobilization remained largely confined to the digital sphere, limiting its influence on broader political change. In contrast, Decision Number 70/PUU-XXII/2024 stimulated a more integrated form of digital activism by connecting online discussions with mainstream media coverage, civil society engagement, and collective offline actions. This integration significantly enhanced political awareness, strengthened political transparency, expanded public participation, and generated stronger public pressure on the policy-making process.

This study concludes that the effectiveness of digital activism in fostering democratization is determined not merely by the intensity of online discussions but also by its capacity to connect digital mobilization with social actors, mainstream media, and collective action beyond the digital sphere. Consequently, digital activism serves as an effective instrument of participatory democracy when online engagement is successfully transformed into tangible social and political change.

Keywords: Digital Activism, Democratization, Constitutional Court, Social Network Analysis, Political Awareness, Political Participation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR HALAMAN	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG	1
II. RUMUSAN MASALAH	5
III. TUJUAN PENELITIAN	5
IV. MANFAAT PENELITIAN.....	5
V. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1 . TEORI DAN KONSEPTUAL.....	8
II.1.1. Teori Aktivisme Digital Terintegrasi (<i>Theory Integrated Digital Activism</i>).....	16
II.1.2. Teori Aktivisme Digital dalam Ruang Hybrid (<i>Theory Hybrid Media Ecology</i>)	17
II.1.3. Konseptual.....	19
III.2. KERANGKA PENELITIAN.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
III.1. Metodologi Penelitian	27
III.2. Desain Penelitian	28
III.3. Rancangan Pengolahan Data Penelitian.....	28
III.4. Rancangan Pendekatan Penelitian	29
III.4. 1. Kuantitatif (Data Angka/Statistik) sebagai Survei Online	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Aktivisme Digital pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	33

4.1.1. Struktur Jaringan Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	33
4.1.2. Narasi dan <i>Hashtag</i> dalam Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	37
4.2. Aktivisme Digital pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.....	48
4.2.1. Struktur Jaringan Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.....	48
4.2.2. Narasi dan <i>Hashtag</i> dalam Percakapan Digital pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.....	53
4.3. Political Awareness Politik dalam Aktivisme Digital	64
4.3.1. Peningkatan Political Awareness di Ruang Online.....	64
4.3.2. Political Awareness dalam Perspektif Lukas Schlögl	65
4.3.3. Political Awareness dalam Perspektif Merlyna Lim.....	68
4.3.4. Hubungan Political Awareness dan Transparansi Politik dalam Aktivisme Digital	71
4.4. Transparansi Politik dalam Aktivisme Digital.....	73
4.4.1. Tingkat Pencapaian Transparansi Politik dalam Aktivisme Digital ...	74
4.4.2. Transparansi Politik dalam Perspektif Lukas Schlögl	76
4.4.3. Transparansi Politik dalam Perspektif Merlyna Lim	79
4.5. Partisipasi Politik dalam Aktivisme Digital	82
4.5.1. Tingkat Pencapaian Partisipasi Politik dalam Aktivisme Digital.....	82
4.5.2. Partisipasi Politik dalam Perspektif Lukas Schlögl	84
4.5.3. Partisipasi Politik dalam Perspektif Merlyna Lim.....	86
4.6. Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi.....	89
4.6.1. Tingkat Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi	89
4.6.2. Efektivitas Aktivisme Digital dalam Perspektif Lukas Schlögl	91
4.6.3. Efektivitas Aktivisme Digital dalam Perspektif Merlyna Lim.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Flowchart Kerangka Berfikir	26
4.1	Visualisasi Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	36
4.2.	Word Cloud Klaster Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	42
4.3	Word Cloud Klaster Pro Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	47
4.4	Visualisasi Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	52
4.5	Word Cloud Klaster Kritik (Kontra) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	58
4.6	Word Cloud Klaster Pro (Pendukung) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	63

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul	Halaman
4.1	Statistik Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	35
4.2	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	39
4.3.	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Pro Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	44
4.4	Statistik Jaringan Percakapan Digital Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	51
4.5	Perbandingan Statistik Jaringan Putusan MK Nomor 90 dan Putusan MK Nomor 70	53
4.6	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	55
4.7	Lima <i>Hashtag</i> Dominan pada Klaster Pendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	60
4.8	Political Awareness Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	67

4.9	Political Awareness Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	69-70
4.10	Hubungan Political Awareness dan Transparansi Politik Berdasarkan Temuan Empiris	72
4.11	Transparansi Politik di Ruang Online	75-76
4.12	Analisis Transparansi Politik Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	77
4.13	Transparansi Politik Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	79
4.14	Tingkat Pencapaian Partisipasi Politik dalam Aktivisme Digital	82
4.15	Partisipasi Politik Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	85
4.16	Partisipasi Politik Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	87
4.17	Tingkat Efektivitas Aktivisme Digital dalam Mendorong Demokratisasi	89
4.18	Efektivitas Aktivisme Digital Berdasarkan Perspektif Lukas Schlögl	92
4.19	Efektivitas Aktivisme Digital Berdasarkan Perspektif Merlyna Lim	96
